

PENDIDIKAN ISLAM DALAM KONTEKS KOLONIALISME DAN PASCA-KOLONIALISME

MINDANI¹, AZIZAH ARYATI², TITIN SUMARNI³, DERNA WATI⁴, JASRIN

ABITO⁵ ¹²³⁴⁵PROGRAM PASCASARJANA PENDIDIKAN AGAMA

ISLAM/UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

(UIN)

**Email : mindani70@gmail.com¹, azizaharyati@mail.uinfasbengkulu.ac.id²,
titinsumarni0422@gmail.com³, Wderna65@gmail.com⁴,
abxjasrin@gamil.com⁵**

ABSTRACT

Islamic education in Indonesia has a long history closely linked to the nation's socio-political dynamics, from the era of Islamic kingdoms, colonialism, to the post-colonial era. During the Islamic kingdoms, education served as a center for preaching, moral formation, and the dissemination of knowledge. With the arrival of Dutch colonialism, the Islamic education system came under severe pressure due to secular policies and colonial political control that limited the role of Islamic institutions. Nevertheless, Islamic scholars and figures continued to play a crucial role in maintaining the identity and independence of Islamic education through Islamic boarding schools (pesantren) and madrasahs (Islamic boarding schools). Post-colonialism brought new challenges in the form of modernization and globalization, which demanded the integration of religious and general knowledge. Through a qualitative approach and literature review, this study aims to analyze the development of Islamic education from a historical perspective, focusing on the era of Islamic kingdoms, colonialism, and its transformation in the post-colonial era. The results show that Islamic education is highly adaptable to social and political change and contributes significantly to the formation of the character of the Indonesian nation.

Keywords: *Islamic Education, Colonialism, Trade, Islamic Boarding Schools and Madrasas, Post-Colonialism*

ABSTRAK

Pendidikan Islam di Indonesia memiliki perjalanan panjang yang erat kaitannya dengan dinamika sosial-politik bangsa, mulai dari Perdagangan Islam, masa kolonialisme, hingga era pasca-kolonialisme. Pada masa perdagangan islam, pendidikan menjadi pusat dakwah, pembentukan moral, serta penyebaran ilmu pengetahuan. Ketika kolonialisme Belanda masuk, sistem pendidikan Islam mengalami tekanan hebat akibat kebijakan sekuler dan kontrol politik kolonial yang membatasi peran lembaga-lembaga Islam. Meski demikian, ulama dan tokoh-tokoh Islam tetap memainkan peran penting dalam mempertahankan identitas dan kemandirian pendidikan Islam melalui pesantren dan madrasah. Pasca-kolonialisme membawa tantangan baru berupa modernisasi dan globalisasi yang menuntut integrasi antara ilmu agama dan ilmu umum. Melalui pendekatan kualitatif dan kajian pustaka, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perkembangan pendidikan Islam dari perspektif historis, dengan fokus pada masa kerajaan Islam, kolonialisme, serta transformasinya pada masa pasca-kolonialisme. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendidikan Islam memiliki daya adaptasi tinggi terhadap perubahan sosial dan politik serta berkontribusi besar dalam pembentukan karakter bangsa Indonesia.

Kata Kunci: Pendidikan Islam, Kolonialisme, Perdagangan, Pesantren dan Madrasah, Pasca-Kolonialisme

A. Pendahuluan

Pendidikan Islam merupakan aspek fundamental dalam pembentukan karakter dan identitas umat Muslim. Sejak masa awal Islam, pendidikan berperan sebagai sarana transmisi nilai-nilai ilahiah dan pengetahuan untuk membentuk manusia yang beriman, berilmu, dan berakhlak mulia. Rasulullah SAW sendiri menegaskan pentingnya pendidikan islam. Ketika kolonialisme Barat mulai memasuki dunia Islam pada abad ke-13 hingga awal abad ke-20, Kedatangan bangsa Eropa ke Nusantara membawa perubahan besar dalam struktur sosial dan sistem pengetahuan masyarakat. Kolonialisme tidak hanya bermaksud mengeksplorasi sumber daya alam dan

ekonomi, tetapi juga memperkenalkan sistem pendidikan modern ala Barat yang berorientasi pada kepentingan administrasi dan politik penjajahan. Pendidikan kolonial secara sistematis meminggirkan pendidikan Islam dengan memberikan akses dan legitimasi hanya kepada sekolah-sekolah sekuler yang menggunakan bahasa Belanda serta kurikulum rasionalistik. Akibatnya, lembaga pendidikan Islam tradisional diposisikan sebagai sistem alternatif yang tidak diakui secara formal oleh pemerintah kolonial. Namun demikian, di balik tekanan tersebut, pendidikan Islam justru menjadi ruang perlawanan kultural dan ideologis yang melahirkan kesadaran nasional dan semangat antikolonial. Setelah masa kolonial berakhir, dunia Islam memasuki era pasca-kolonial, yang ditandai dengan upaya rekonstruksi sistem pendidikan agar sesuai dengan nilai Islam dan kebutuhan zaman modern. Meskipun penjajahan fisik telah berakhir, warisan pemikiran kolonial seperti dikotomi pendidikan, sekularisasi ilmu, dan ketergantungan pada sistem Barat masih terasa kuat. pendidikan Islam telah berkembang melalui berbagai lembaga tradisional seperti pesantren, surau, dan majelis taklim yang tersebar

di berbagai wilayah kepulauan Indonesia. Lembaga-lembaga ini tidak hanya menjadi sarana transmisi ilmu keislaman, tetapi juga pusat pembentukan karakter moral dan sosial masyarakat Muslim. Sistem pendidikan ini pada awalnya bersifat mandiri, berbasis komunitas, dan tidak terikat dengan otoritas kekuasaan tertentu

Pendidikan Islam di masa kolonial tidak serta-merta terpinggirkan sepenuhnya. Melalui adaptasi dan inovasi, banyak tokoh ulama dan intelektual Muslim merespons perubahan tersebut dengan membentuk sistem pendidikan yang lebih terorganisasi. Munculnya lembaga seperti Muhammadiyah (1912), Persatuan Islam (1923), dan Nahdlatul Ulama (1926) menunjukkan bahwa pendidikan Islam tidak hanya bertahan, tetapi juga berevolusi. Reformasi ini mencerminkan kemampuan lembaga Islam untuk menyesuaikan diri dengan perubahan zaman tanpa mengorbankan nilai-nilai dasar keislaman. Pendidikan Islam di periode ini menjadi arena perjuangan ideologis antara modernitas kolonial dan nilai-nilai Islam, sekaligus menjadi tempat tumbuhnya gerakan kebangsaan yang berorientasi pada kemerdekaan.

Setelah kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945, pendidikan Islam memasuki fase baru yang ditandai dengan proses integrasi ke dalam sistem pendidikan nasional. Pemerintah melalui Kementerian Agama berusaha menempatkan pendidikan Islam sebagai bagian penting dari pembangunan nasional dengan memperkenalkan kurikulum terpadu antara ilmu agama dan ilmu umum. Lahirnya IAIN (sekarang UIN) menjadi tonggak penting bagi perkembangan akademik pendidikan Islam modern. Namun, integrasi ini tidak tanpa tantangan. Warisan kolonial dalam bentuk dikotomi antara “ilmu agama” dan “ilmu umum” masih terus memengaruhi cara pandang masyarakat dan kebijakan pendidikan nasional. Dalam konteks inilah muncul kebutuhan untuk melakukan dekolonialisasi pengetahuan, yakni usaha merekonstruksi paradigma pendidikan agar lebih berpihak pada nilai-nilai lokal dan keislaman yang kontekstual.

Berdasarkan latar belakang tersebut, tulisan ini bertujuan untuk menganalisis perjalanan pendidikan Islam di Indonesia dalam tiga konteks besar: masa kerajaan Islam, masa kolonialisme, dan masa pasca-kolonialisme. Fokus pembahasan

diarahkan pada bagaimana pendidikan Islam bertransformasi dalam menghadapi tekanan dan pengaruh eksternal, bagaimana lembaga dan tokoh-tokohnya melakukan adaptasi dan perlawanan, serta bagaimana nilai-nilai Islam terus berperan dalam membentuk identitas bangsa hingga masa kini. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi konseptual bagi pengembangan pendidikan Islam yang lebih kontekstual, kritis, dan responsif terhadap dinamika zaman, serta menjadi pijakan dalam upaya dekolonialisasi paradigma pendidikan nasional.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif historis yang berorientasi pada penelusuran data dan fakta masa lalu secara sistematis, kritis, dan interpretatif. Pendekatan ini dipilih karena topik yang dikaji, yakni dinamika dan transformasi pendidikan Islam di masa kolonialisme Belanda, merupakan peristiwa historis yang tidak dapat dilepaskan dari konteks sosial, politik, dan budaya zamannya. Penelitian bersifat deskriptif-analitis, di mana data dikaji bukan hanya untuk direkonstruksi secara kronologis, tetapi juga untuk ditafsirkan secara mendalam dalam

kerangka tema besar seperti kolonialisasi, resistensi pendidikan, dan reformasi kelembagaan Islam. Analisis dilakukan melalui historiografi tematik dengan fokus pada narasi transformasi, bukan sekadar kronologi peristiwa.

Pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka (library research), dengan menelaah karya-karya ilmiah yang relevan berupa jurnal-jurnal terakreditasi SINTA 1 hingga SINTA 3, buku akademik dari penulis kredibel, dan dokumen sejarah seperti Ordonansi Sekolah Liar dan kebijakan Politik Etis. Sumber-sumber tersebut dianalisis menggunakan pendekatan hermeneutik sejarah, yakni penafsiran teks akademik atau dokumen historis berdasarkan konteks sosial-budaya dan ideologis saat itu. Sumber data diklasifikasikan menjadi dua jenis: sumber primer yang terdiri dari artikel jurnal ilmiah dan buku akademik; serta sumber sekunder seperti ensiklopedia akademik dan repositori institusi resmi seperti UIN, IAIN, atau Perpusnas. Validitas data dijaga melalui triangulasi sumber, yaitu dengan membandingkan informasi dari berbagai sumber akademik yang berbeda namun membahas isu yang sama, guna memastikan akurasi dan objektivitas hasil penelitian.

Dengan metode ini, diharapkan penelitian mampu merekonstruksi dan menganalisis bagaimana pendidikan Islam di Indonesia tidak hanya bertahan di bawah tekanan kolonial, tetapi juga mengalami transformasi signifikan dalam bentuk kelembagaan, pendekatan pedagogis, serta nilai-nilai yang dibawanya.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Pengertian Kolonialisme dan Pasca-Kolonialisme

Kolonialisme berasal dari kata *colonia* (Latin) yang berarti "pemukiman." Dalam konteks politik, kolonialisme diartikan sebagai sistem penguasaan suatu bangsa terhadap bangsa lain untuk menguasai sumber daya ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Kolonialisme tidak hanya menaklukkan secara fisik, tetapi juga menciptakan hegemoni ideologis dengan cara menanamkan superioritas budaya penjajah atas bangsa terjajah. (Miftakhuddin, 2020)

Sementara itu, pasca-kolonialisme adalah periode setelah kolonialisme berakhir. Namun, istilah ini tidak sekadar menunjukkan waktu setelah penjajahan, melainkan juga gerakan intelektual dan budaya untuk menolak dominasi nilai-nilai dan cara berpikir kolonial yang

masih bertahan dalam masyarakat bekas jajahan. pasca-kolonialisme merupakan “suatu perjuangan untuk merebut kembali kekuasaan budaya dan identitas dari bayang-bayang penjajahan.”(Suryawan, 2019)

Dalam konteks pendidikan, kolonialisme dan pasca-kolonialisme menunjukkan dua fase besar dalam perubahan paradigma keilmuan dan sistem nilai: pertama, masa di mana ilmu dijadikan alat dominasi; dan kedua, masa pencarian kembali identitas ilmu yang sesuai dengan nilai-nilai Islam dan kemanusiaan.

Kolonialisme secara umum didorong oleh motif ekonomi, politik, dan ekspansi wilayah. Tujuan utamanya adalah menguasai sumber daya alam dan tenaga kerja. Namun, dalam konteks dunia Islam, kolonialisme memiliki dimensi ideologis dan spiritual yang lebih dalam. Penjajahan terhadap dunia Islam tidak hanya bertujuan ekonomi, tetapi juga upaya mengikis kekuatan moral dan peradaban Islam.(Sokoy et al., 2025)

Islam memandang setiap bentuk penjajahan sebagai tindakan zalim yang bertentangan dengan prinsip keadilan. Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Hujurat [49]: 13:

Artinya: *“Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal”*.

Ayat ini menegaskan prinsip kesetaraan manusia dan menolak segala bentuk dominasi ras atau bangsa. Sementara kolonialisme Barat didasarkan pada ide “superioritas peradaban Barat,” Islam menegakkan prinsip tauhid yang menolak segala bentuk penghambaan selain kepada Allah. Oleh karena itu, kolonialisme terhadap dunia Islam juga merupakan perang terhadap akidah.

Dalam konteks pendidikan, kolonialisme berusaha menggantikan sistem pendidikan Islam (yang berpusat pada *madrasah* dan *pesantren*) dengan sistem pendidikan sekuler Barat yang berorientasi pada rasionalisme dan utilitarianisme. Dengan demikian, kolonialisme terhadap dunia Islam adalah kolonialisme intelektual dan spiritual, bukan hanya fisik.(Irwan et al., 2024)

2. Tujuan Kolonialisme terhadap Pendidikan Islam

Tujuan kolonialisme terhadap pendidikan Islam bersifat strategis, yaitu untuk melemahkan kekuatan intelektual, sosial, dan moral umat Islam. Di antaranya:(Mubin & Aziz, 2020)

- a. Menurunkan wibawa ulama dan lembaga pendidikan Islam. Ulama dianggap sebagai pemimpin spiritual dan simbol perlawanan terhadap penjajahan. Karena itu, pendidikan Islam dibatasi agar tidak menjadi basis ideologis perlawanan.
- b. Membentuk elit pribumi yang loyal kepada penjajah. Melalui pendidikan sekuler, penjajah mencetak golongan terdidik yang berpikir seperti Barat dan memandang rendah tradisi Islam.
- c. Menciptakan dikotomi pendidikan. Ilmu agama dianggap statis dan tradisional, sementara ilmu Barat dianggap rasional dan modern. Akibatnya, sistem pendidikan Islam terpinggirkan.
- d. Mengubah paradigma ilmu. Pendidikan kolonial menanamkan cara berpikir empiris-materialistik, menjauhkan manusia dari nilai-nilai spiritual.

3. Dampak Kolonialisme terhadap Pendidikan Islam

Dampak kolonialisme terhadap pendidikan Islam meliputi terciptanya sistem pendidikan dualisme dan dikotomis yang memisahkan antara ilmu agama dan umum, pembatasan ruang gerak dan pengawasan ketat terhadap madrasah dan guru agama, serta pengenalan nilai dan metode pendidikan Barat yang berpotensi mengikis tradisi lokal dan identitas budaya Islam.(Nurhayati et al., 2019)

Meskipun ada juga dampak positif seperti munculnya golongan terpelajar dan formalisasi pendidikan, secara keseluruhan kolonialisme bertujuan melemahkan pendidikan Islam dan mengontrol masyarakat Muslim. (Mubin & Aziz, 2020)

a. Dikotomi Ilmu dan Pendidikan

Sebelum kolonialisme, sistem pendidikan Islam bersifat integral: ilmu agama dan ilmu dunia diajarkan dalam satu kerangka tauhid. Namun, kolonialisme memisahkan keduanya sehingga lahir dua sistem berbeda: pendidikan Islam tradisional dan pendidikan umum sekuler.

b. Marginalisasi Lembaga Islam

Pesantren dan madrasah dibatasi aktivitasnya. Sementara itu, sekolah-sekolah kolonial justru didukung penuh dengan fasilitas dan

kurikulum modern. Akibatnya, masyarakat mulai menganggap pendidikan Barat sebagai jalan menuju kemajuan sosial.

c. Krisis Identitas Intelektual.

Kolonialisme menyebabkan umat Islam kehilangan kepercayaan diri terhadap tradisi keilmuannya sendiri. Banyak intelektual Muslim yang mengadopsi cara berpikir Barat dan memisahkan agama dari ilmu pengetahuan. Nabi SAW telah memperingatkan dalam hadis:

“kamu akan mengikuti kebiasaan orang-orang sebelum kamu sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta” (HR. Bukhari dan Muslim).

Hadis ini menegaskan bahwa mengikuti sistem dan nilai luar tanpa penyaringan akan menjauhkan umat dari jati dirinya.

4. Dampak Kebijakan Kolonialisme terhadap Pendidikan Islam

Kebijakan kolonial Belanda memiliki dampak mendalam terhadap struktur dan pendidikan mengingat Islam perkembangan di Belanda Indonesia, berusaha melemahkan pengaruh pendidikan Islam yang

dianggap dapat mengancam kekuasaan mereka. Pemerintah kolonial menerapkan sejumlah kebijakan yang berfokus pada pembatasan kurikulum, pengawasan ketat terhadap lembaga lembaga pendidikan Islam, dan pendirian sekolah-sekolah kolonial yang berfungsi sebagai pesaing. Kebijakan ini di rancang untuk mengurangi peran pendidikan Islam dalam membentuk identitas dan solidaritas sosial masyarakat Muslim di Indonesia.

a. Pembatasan Kurikulum Pendidikan Islam

Pemerintah kolonial sangat khawatir dengan pendidikan Islam potensi untuk menyebarkan ajaran yang dapat membangkitkan semangat perlawanan terhadap kolonialisme. Salah satu kebijakan utama yang di terapkan adalah kurikulum di pembatasan lembaga-lembaga pendidikan Islam(Yuniendel, 2024). Materi yang berkaitan dengan sejarah Islam, ajaran jihad, atau topik-topik lain yang dianggap bisa menginspirasi pemikiran anti-kolonial diawasi dengan ketat dan sering kali dilarang. Pesantren dan madrasah yang tidak mematuhi pembatasan ini bisa ditutup atau dibatasi aktivitasnya.

Kebijakan pembatasan kurikulum ini berdampak langsung pada ruang gerak pendidikan Islam, memaksa lembaga-lembaga pendidikan tersebut berfokus pada materi-materi agama dasar dan menghindari diskusi yang dianggap politis dan subversif. Akibatnya, pendidikan Islam kesempatan kehilangan untuk mengembangkan kurikulum yang menyentuh aspek sosial, politik, dan sejarah Islam secara mendalam. Hal ini tidak hanya membatasi perkembangan intelektual membentuk siswa, tetapi stigma juga bahwa pendidikan Islam kurang relevan untuk kebutuhan kehidupan modern, terutama dalam konteks lapangan pekerjaan yang semakin berkembang.

b. Pengawasan Ketat terhadap Lembaga Pendidikan Islam Pada tahun 1925 M.

Pemerintah mengeluarkan peraturan yang lebih ketat lagi terhadap pendidikan Agama Islam yaitu bahwa tidak semua orang (kyai) boleh memberikan pelajaran mengaji. Peraturan itu mungkin disebabkan oleh adanya gerakan organisasi pendidikan Islam yang sudah tampak tumbuh seperti Muhammadiyah,

Partai syarikat Islam, Al-Irsyad dan lain-lain. Peraturan ini dikeluarkan setelah munculnya gerakan nasionalisme Islamisme pada tahun 1982 M, berupa sumpah pemuda (Tirolian, 2016). Untuk lebih memperkuat kontrol atas pendidikan Islam, pemerintah kolonial memberlakukan pengawasan ketat terhadap kegiatan lembaga-lembaga pendidikan Islam (Niswah et al., 2025). Ordinansi Sekolah Liar (wilde scholen ordonnantie) yang di terapkan pada tahun 1932 adalah contoh konkret dari kebijakan ini, di mana lembaga pendidikan non-pemerintah, termasuk pesantren dan madrasah, diwajibkan memperoleh izin dari pemerintah kolonial untuk dapat beroperasi (Achidsti, 2014). membatasi kebebasan operasional lembaga pendidikan Islam, mereka untuk memaksa menjalankan kurikulum dan metode yang sejalan dengan standar yang ditetapkan pemerintah. Pengawasan ini menciptakan tekanan bagi lembaga pendidikan Islam untuk menyesuaikan aktifitasnya dengan keinginan kolonial. Banyak lembaga yang harus mengubah kurikulum, metode pengajaran, bahkan

manajemennya agar tetap dapat beroperasi. Selain itu, akses ke bantuan finansial dan sumber daya sangat terbatas bagi lembaga pendidikan Islam, yang semakin memperparah ketertinggalan mereka dari sekolah-sekolah yang disetujui dan didukung oleh pemerintah kolonial. Pengawasan ketat ini pada akhirnya membatasi independensi pendidikan Islam dan mendorong mereka untuk beroperasi dalam kondisi yang tidak ideal, baik dari segi fasilitas maupun materi pengajaran. Jika kita melihat peraturan-peraturan pemerintah Belanda yang demikian ketat dan keras mengenai pengawasan, tekanan dan pemberantasan aktivitas madrasah dan pondok pesantren di Indonesia, maka seolah-olah dalam tempo yang tidak lama Pendidikan Islam akan menjadi lumpuh atau porak poranda, akan tetapi apa yang dapat disaksikan dalam sejarah adalah keadaan yang sebaliknya. Masyarakat Islam di Indonesia pada zaman itu laksana air hujan atau air dibendung. rabah yang sulit Dibendung disini, meluap disana Jiwa islam tetap terpelihara dengan baik, para ulama dan kyai bersikap non

cooperative dengan Belanda. Mereka menyingkir dari tempat yang dekat dengan Belanda. Mereka mengharamkan kebudayaan yang dibawa Belanda dengan berpegang teguh kepada hadits Nabi Muhammad SAW yang artinya: "barang siapa yang menyerupai suatu golongan maka ia termasuk golongan tersebut" (HR. Abu Dawud dan Imam Hibban).

c. Pengaruh Sekolah Kolonial Sebagai Pesaing Pendidikan Islam

Salah satu strategi utama pemerintah kolonial untuk melemahkan pendidikan Islam adalah dengan mendirikan sekolah sekolah kolonial yang memiliki daya tarik ekonomi dan sosial yang lebih tinggi. Sekolah-sekolah seperti Hollandsch inlandsche school (HIS) dan Meer Onderwijs Uitgebreid (MULO) Lager didirikan sebagai alternatif bagi masyarakat pribumi yang menginginkan pendidikan yang dianggap lebih bergengsi (Untung, 2013). Sekolah sekolah ini pengetahuan mengajarkan umum dengan kurikulum berbasis bahasa Belanda dan menawarkan prospek kerja yang lebih menjanjikan dibawah pemerintah kolonial. Dengan

keberadaan sekolah kolonial ini, pendidikan Islam mengalami penurunan minat dari masyarakat yang melihat pendidikan Barat sebagai sarana mobilitas sosial dan ekonomi yang lebih efektif. Lulusan sekolah kolonial biasanya mendapatkan akses ke pekerjaan di sektor pemerintah dan bisnis yang membutuhkan berbahasa keterampilan Belanda serta pengetahuan yang lebih luas di luar konteks keagamaan. Hal ini menyebabkan pendidikan Islam kurang prestisius, karena hanya fokus pada ajaran agama dan tidak memberikan keuntungan praktis dalam dunia kerja. Akibatnya, terjadi perubahan preferensi di kalangan masyarakat Muslim, terutama dari kalangan kelas menengah, yang mulai beralih ke sekolah-sekolah kolonial demi masa depan yang lebih cerah bagi anak-anak mereka.

Hanya menyediakan akses pendidikan bagi masyarakat yang sebelumnya terbatas, tetapi juga berusaha untuk membentuk karakter dan moralitas yang kuat sesuai dengan ajaran Islam. Upaya mereka dalam mendirikan sekolah-sekolah dan madrasah menjadi tonggak

dalam pergerakan modernisasi pendidikan Islam di Indonesia, yang kemudian membuka jalur bagi perkembangan pendidikan Islam yang lebih inklusif dan beradaptasi dengan zaman.

Kesimpulan

Pendidikan Islam pada masa kolonialisme Belanda mengalami dinamika dan transformasi yang signifikan sebagai respons terhadap tekanan, pengawasan, serta marginalisasi yang dilakukan oleh pemerintah kolonial. Meskipun pada awalnya pendidikan Islam bersifat mandiri dan berkembang dalam sistem tradisional pesantren, dominasi politik kolonial memaksa umat Islam untuk menyesuaikan dan merekonstruksi bentuk serta sistem pendidikan mereka.

Kebijakan kolonial yang menekan pendidikan Islam, seperti Ordonansi Sekolah Liar dan dominasi sistem pendidikan sekuler, mendorong munculnya berbagai bentuk perlawanan kultural dan intelektual. Di antaranya adalah transformasi pesantren menuju sistem yang lebih terstruktur, lahirnya madrasah sebagai lembaga pendidikan modern berbasis Islam, serta pendirian organisasi seperti Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama yang menjadikan

pendidikan sebagai strategi utama perjuangan.

Transformasi ini bukanlah hasil kebetulan, melainkan bagian dari proses sejarah panjang umat Islam Indonesia dalam mempertahankan identitas keislaman sekaligus menyesuaikan diri dengan dinamika zaman. Dalam

konteks ini, pendidikan Islam tidak hanya berhasil bertahan, tetapi juga menunjukkan kapasitasnya untuk berinovasi, membangun jaringan, dan menciptakan sistem yang lebih tangguh dan adaptif.

DAFTAR PUSTAKA

- Achidsti, S. A. (2014). Eksistensi Kiai Dalam Masyarakat. *IBDA: Jurnal Kajian Islam dan Budaya*, 12(2), 149–171.
- Asmuri, A., Hidayati, O., & Fitri, A. (2025). Kebijakan Pendidikan Islam di Madrasah. *Ainara Journal (Jurnal Penelitian dan PKM Bidang Ilmu Pendidikan)*, 6(1), 32–42.
- Barnas Rasmana, S. (2021). *Ordonansi Guru: Kebijakan Pemerintah Kolonial Hindia Belanda Terhadap Guru Agama Islam (1905-1942)*. CV. Anugrah Utama Raharja.
- Caesaranto, H. N. A., Al Farabi, M. F., & Nuryani, S. (2024). EKSISTENSI NAHDLATUL ULAMA SEBAGAI
- KEGIATAN SOSIAL DAN PENGAJIAN RUTINAN DI KAMPUNG LEGOKGOONG: Peran Nahdlatul Ulama dalam Penguatan Solidaritas dan Kesadaran Religius di Kampung Legookgoong. *PROCEEDINGS UIN SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG*, 5(5), 1–13.
- Chairiyah, Y. (2021). Sejarah Perkembangan Sistem Pendidikan Madrasah Sebagai Lembaga Pendidikan Islam. *MA'ALIM: Jurnal Pendidikan Islam*, 2(01), 49–60.
- Eryandi, E. (2023). Integrasi nilai-nilai keislaman dalam pendidikan karakter di era digital. *Kaipi: Kumpulan Artikel Ilmiah Pendidikan Islam*, 1(1), 12–16.
- Fahriyah, L. (2024). Pembelajaran Kontekstual Dalam Pendidikan Islam. *Jurnal Ilmiah Multidisipin*, 2(2), 95–103.
- Hauzi, F., Lensa, R., Yusdiana, E., Safitri, A., Nusraini, I., Novita, W., Isnaini, F., Jufni, M., Yusuf, M., & Sartika, D. (2024). *Historiografi Undang-Undang Pendidikan Di Indonesia: Sejak Zaman Kolonial Hingga Zaman Reformasi*. Sada Kurnia Pustaka.
- Fuad, R., & Iswantir, M. (2024). Peningkatan kualitas pendidikan di pesantren melalui inovasi kurikulum. *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial*, 3(2), 118–131.
- Harmathilda, H., Yuli, Y., Hakim, A. R.,

- Damayanti, D., & Supriyadi, C. (2024). *Kaipi: Kumpulan Artikel Ilmiah Transformasi Pendidikan Pesantren Di Era Modern: Antara Tradisi Dan Inovasi*. Maftuhah, M. A. (n.d.). *Karimiyah*, 4(1), 33–50.
- Hasibuan, L. R., & Hasibuan, Z. E. (2024). KEBIJAKAN POLITIK HINDIA BELANDA TERHADAP PENDIDIKAN ISLAM DI INDONESIA: SEBUAH TINJAUAN HISTORIS. *Ahsani Taqwim: Jurnal Pendidikan dan Keguruan*, 1(3), 104–119.
- Irawan, H. (2024). Memahami Organisasi Kurikulum Pendidikan Agama Islam: Perspektif Dan Evaluasi Dalam Konteks Pendidikan Umum. *Peradaban Journal of Interdisciplinary Educational Research*, 2(2), 42–54.
- Irwan, I., Ishomuddin, I., & Faridi, F. (2024). MENELUSURI WARISAN KEBIJAKAN PENDIDIKAN ISLAM DI MASA KOLONIAL BELANDA. *Fitrah: Jurnal Studi Pendidikan*, 15(2), 118–134.
- Iswahyudi, M. S., Irianto, I., Salong, A., Nurhasanah, N., Leuwol, F. S., Januaripin, M., & Harefa, E. (2023). *Kebijakan dan inovasi pendidikan: Arah pendidikan di masa depan*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Juariah, S. (2023). Paradigma pendidikan Islam dan pengembangan sumber daya insani dalam membentuk etika dan karakter dalam masyarakat Islam.